

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 22 April 2019

Nomor Surat : 082.1/MHI-SKEP/IV/2019
Perihal : Keputusan Hasil Audit Survailen I Sertifikasi Legalitas Kayu
PT. Bali Taru Utama

Kepada Yth.
Direktur
PT. Bali Taru Utama
Jl. Raya Serang KM 11, Kp. Kadu RT 002/001, Kelurahan Bunder
Kacamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Surveilans I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di PT. Bali Taru Utama yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 April 2019 dan Rekomendasi Reviewer pada 22 April 2019, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Bali Taru Utama No. **0056/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **8 April 2024**, dengan ruang lingkup :
 - a. Nama pemegang izin : PT. Bali Taru Utama
 - b. Pemegang Izin : IUI No. 530/2211-Perindag/SK.IUI/XI/2010
 - c. Lokasi : Jl. Raya Serang KM 11, Kp. Kadu RT 002/001, Kel. Bunder, Kec. Cikupa Kab. Tangerang,
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Industri Alat-alat Tulis dan Gambar termasuk perlengkapannya 6.000.000 gross/tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen/penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen ke II akan dilaksanakan paling lambat bulan April 2020.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Vysca Arryani
Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia
Tembusan Kepada Yth.

1. Sekrearis Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur PPHH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
4. Kepala BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan